

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN MELALUI
PENGELOLAAN HUTAN SOSIAL SECARA SINERGIS-ADAPTIF-
BERKELANJUTAN

V. Rudy Handoko; Ujianto; IA Brahmasari; Sukarno Hardjosoewito

ABSTRACT

To empowerment society in taking out from poverty is the main agenda as an as an effort to make Indonesian people more prosperous within the recent twenty years. It will be the exact way for striving the welfare of society out of the poverty if it refers to: (a) locus, it is poverty areas; (b) focus, it is the main program for the poor to have means of livelihood; and (c) modus, it is the emphasizing and formulation of empowerment which is based on community autonomy, autonomy, and self-supporting basis. This study tries to measure the synergic, adaptive, and sustainability of social forestry program and significance of social forest governance for the empowerment of the villagers that live in nearby forest which is located in Ngawi regency, East Java province. By using survey research method and regression analysis, it can be concluded in these parts, namely: (1) social forest governance synergic is not maximum yet because of role domination and the main institution contribution of Perum Perhutani/forestry public corporation (central government mandate).; (2) the adaptation is good enough because the villagers make social forest program as their own main means of livelihood; (3) the sustainability of social forest program is very reliable in economy, ecology and social culture; and (4) In spite of being the effect of variable of social forest governance to the variable of empowering the people who live in nearby forest, the level of connection from both variables is low (only 13,5% of the empowerment variables can be described by using social forest government variable). It needs synchronizing the effort of empowerment forest villagers through social forest program with the rolling empowerment program of region (regency).

Key word: social forestry governance; social empowerment

Salah satu dari tiga agenda utama dalam program pembangunan nasional adalah 'Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia'. Kelompok utama sasaran peningkatan kesejahteraan adalah masyarakat terdorong miskin. Target yang ingin dicapai adalah berkurangnya persentase penduduk terdorong miskin dari 16,6 % atau 36,4 juta jiwa pada 2004 menjadi 8,2 % pada 2009. (Berita Resmi Statistik, 2006). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 tahun 2006 tentang rencana kerja pembangunan (RKPD) daerah Jawa Timur 2007, prioritas program pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 17 % dari 22.51% (2005) dan 19,89% (2006).

Jika diamati distribusi masyarakat terdorong miskin berada pada wilayah kantong-kantong kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kantong kemiskinan di pedesaan berada pada kawasan sumber kekayaan alam meliputi: (a) nelayan di pesisir pantai lautan; (b) masyarakat desa hutan; (c) masyarakat di sekitar kawasan bahan tambang; dan (d) para buruh tani pada tanah pertanian dan perkebunan. Kantong kemiskinan di perkotaan berada pada (a) wilayah tengah kota yakni sekitar kawasan

dunia usaha perdagangan dan jasa, dan (b) wilayah pinggiran kota yakni sekitar kawasan industri baik sebagai buruh pabrik maupun masyarakat setempat.

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah kantong-kantong kemiskinan tersebut memerlukan penekanan, perumusan dan formulasi yang berbasis pada (a) otonomi komunitas, (b) kemandirian, dan (c) keswadayaan lokal. Upaya itu diperlukan agar program pemberdayaan dapat terdaya gunakan dengan tingkat efektivitas yang tinggi (ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran). Menurut Bartle (2007, dalam Suprayanto 2009) upaya pemberdayaan masyarakat antara lain berfokus kepada tumbuhnya percaya diri (*confidence*), kepercayaan (*trust*), meningkatnya kesejahteraan (*wealth*), kemampuan berorganisasi (*organization*) dan komunikasi (*communications*).

Kajian dengan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat miskin di desa sekitar hutan tidak lepas dari program revitalisasi hutan di Indonesia yang saat ini sedang digalakkan yaitu melalui program pengelolaan hutan sosial, dan salah satunya adalah program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM). Program tersebut mensyaratkan adanya (a) sinergisitas pengelolaan, (b) adaptivitas penerapan program, dan (c) keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan program. Sinergisitas diperlukan, agar pengelolaan hutan memperoleh dukungan dari pihak lain (non pemerintah). Menurut Siswoko (2009) Government should share roles and authorities to other stakeholders in proportion to each capability. Government was forced to be able to accommodate and provide participatory space to the communities in every step of forest management activities. Adaptivitas diperlukan, agar pengelolaan hutan (sosial) memperoleh dukungan kuat dari masyarakat desa sekitar hutan. Sustainability (terjaminnya keberlangsungan ekonomi, ekologi dan sosial-budaya) diperlukan dalam pengelolaan hutan (sosial) agar dapat diandalkan dalam mencapai sasaran revitalisasi hutan di Indonesia. Singkatnya, kajian ini ingin mengetahui lebih jauh (1) apakah pengelolaan hutan sosial (melalui program PHBM) telah dilaksanakan secara sinergis-adaptif-berkelanjutan, dan (2) apakah pengelolaan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa hutan. Signifikansi itu diperlukan untuk memperoleh kepastian apakah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui program PHBM telah mencapai sasaran akhir yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan (1) metode penelitian survey dengan lokasi di wilayah Perum Perhutani kesatuan pemangku hutan (KPH) Ngawi, Jawa Timur; (2) teknik pengumpulan data melalui: (a) telaah dokumen, (b) observasi lapangan, (c) pengisian kuesioner, (d) wawancara kepada informan penelitian (individu, kelompok, institusi); dan (3) analisis regresi. Variabel dalam penelitian ini adalah: (1) variabel pemberdayaan masyarakat desa hutan (*dependent variable*) dengan indikator-indikator: kebebasan mobilisasi, kemampuan/kemampuan ekonomi, kemandirian sosial/hukum/politik; dan (2) variabel pengelolaan hutan sosial (*independent variable*) dengan indikator-indikator (a) sinergisitas meliputi: peran, relasi dan kontribusi setiap institusi, (b) adaptivitas meliputi: penerimaan program dan perwujudan nilai-fungsi hutan sosial, (c) keberlanjutan menurut kriteria ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis regresi (Matrik 1) penelitian menunjukkan bahwa F hitung (12,592) > F tabel (0,05; $df_1=1, df_2=81$) = 3,92, maka pengelolaan hutan sosial memberikan kontribusi secara signifikan kepada pemberdayaan masyarakat desa hutan. Koefisien

determinasi R^2 atau R square sebesar 0,135 artinya, hanya sebesar 13,5% variasi variabel pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat dijelaskan oleh variabel pengelolaan hutan sosial. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa terberdayanya masyarakat desa hutan justru lebih banyak dipengaruhi oleh program yang dilakukan oleh institusi lain. Kemungkinan program pemberdayaan masyarakat desa (termasuk desa hutan) luncuran pemerintah daerah kabupaten (Ngawi) justru berpengaruh lebih besar dan ada indikasi tidak terintegrasi dengan program pengelolaan hutan sosial (PHBM).

Terdapat fakta (Tabel 1) bahwa di antara beberapa program pengentasan kemiskinan yang digulirkan di desa sekitar hutan: (a) program percepatan pembangunan, program ini dinilai 76.27% dalam memberikan dampak kemajuan daerahnya, akan tetapi program ini dinilai 41.6% dalam mengantarkan mereka pada kemandirian. Ini terjadi karena mereka mengaku hanya 54.94% dalam ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Berbeda dengan temuan Soekamto (2004) di Malang dengan simpulan bahwa pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek atau program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut telah mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat ternyata menjadi lebih baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat; (b) bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, program ini dinilai 61.17% dalam memberikan kemajuan daerah dan hanya 50% dalam mengantarkan petani hutan pada kemandirian dan mereka mengaku berpartisipasi pada program ini sebesar 56.47%. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan di bidang kehutanan tidak ada kaitannya dengan program di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c) bidang ketahanan pangan, pada program ini mereka mengaku 60% berpartisipasi, 70% program memberikan kemajuan daerahnya, dan hanya 55% program ini mengantarkan mereka ke kemandirian. Berarti aktivitas mereka dalam mengerjakan lahan Perum Perhutani untuk menanam palawija (tanaman pangan) lebih diaku sebagai kondisi ketergantungan.

Beberapa fakta (Tabel 2) yang mencerminkan tingkat keberdayaan para petani hutan terkait dengan program pengentasan kemiskinan yang digulirkan antara lain: (a) kebebasan mobilisasi, berada pada tingkat keberdayaan tinggi sebesar 85.71%. Berarti mereka merasakan kebebasan atau berkemampuan, baru pada tataran beraktivitas keseharian seperti pergi ke tempat kerja, ke tempat pelayanan umum dan setaranya; (b) kebebasan membuat keputusan, berada pada tingkat keberdayaan sedang sebesar 84.53%, artinya mayoritas para petani hutan memerlukan bantuan orang lain untuk setiap pengambilan keputusan; (c) keberanian melakukan penuntutan mereka berada pada tingkat keberdayaan rendah, sebesar 85.7%, selebihnya yakni 14.3% mereka menyatakan tidak perlu "berunjuk rasa". Fakta ini mencerminkan bahwa para petani hutan tidak mampu dan sebagian tidak mau menggunakan hak-hak politiknya. Dalam hal ini Purwatiningsih (2004) menemukan di kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang bahwa *Village Development Fund (DPD/K) Program is still considered important to motivate and optimize the peoples' political participation in the village development*. Mungkin program serupa di kabupaten Ngawi tidak berhasil menumbuhkan partisipasi politik para petani hutan. Hal ini sangat riskan, karena keberanian mereka untuk menyampaikan kebenaran diperlukan demi kemajuan pelaksanaan program PHBM; (d) kemampuan membeli komodite, ternyata ada pada tingkat keberdayaan sedang yakni (i)

untuk komodite kecil 51.19%, dan (ii) untuk komodite besar 52.38%; (e) jaminan ekonomi atau kepemilikan barang-barang seperti rumah, tanah, ternak sapi, sepeda motor, tabungan, berada pada tingkat keberdayaan rendah yakni 57.15%. Mereka adalah penduduk golongan pra sejahtera yang memenuhi salah satu syarat menjadi anggota lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).

Apakah fakta keberdayaan para petani hutan terkait dengan kesertaan mereka pada program hutan sosial, perlu dirunut berdasarkan penilaian mereka pada sinergitas, adaptivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program PHBM. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan di pulau Jawa telah dimulai sejak akhir abad XIX antara lain pada program-program: sistem tumpangsari hingga 1960-an, *prosperity approach* 1972, pembangunan masyarakat desa hutan/PMDH 1982, pembinaan masyarakat desa hutan terpadu/PMDHT 1994, dan PHBM. Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang diserahi mengelola hutan produksi dan hutan lindung seluas 2.405.042,44 ha (2,19% dari luas hutan di Indonesia) di wilayah Jawa-Madura, berperan penting pada pengelolaan hutan sosial. Layak, jika masyarakat desa hutan memberikan penilaian (Tabel 3) pada Perum Perhutani sebagai institusi yang paling berperan (87.38%) dan berkontribusi (77.38%) dalam pelaksanaan program PHBM.

Seiring dengan era reformasi di Indonesia, perubahan paradigma pengelolaan hutan dari *state based* ke arah *community based*, menjadikan pemerintah daerah dan masyarakat setempat memiliki akses dalam pengelolaan hutan. Peran pemerintah kabupaten dinilai cukup tinggi (82.38%) berkat intensitas kerja dinas kehutanan dan perkebunan (DisHutBun Kabupaten) pada pelaksanaan program PHBM. Program PHBM menempatkan petani hutan sebagai mitra sejajar (terikat dalam perjanjian kerjasama) dengan Perum Perhutani. Berbeda dengan program hutan sosial sebelumnya, pada program PHBM petani hutan mempunyai kesempatan (hak) untuk beraktivitas di lahan Perum Perhutani sepanjang dan sesesuai dengan usia daur tanaman pokok kehutanan dan berotasi ulang (sepanjang masa). Aktivitas petani hutan dalam memanfaatkan lahan pemerintah itu belum maksimal, terbukti mereka menilai peran diri mereka hanya 70%. Sebagian besar petani hutan hanya memanfaatkan lahan itu dengan tanaman semusim atau palawija (tanaman pangan), semasa usia tanaman pokok kehutanan mencapai 1-3 tahun. Mereka belum memaksimalkan pemanfaatan lahan dengan jenis tanaman tahan teduh di mana usia tanaman pokok kehutanan mencapai lebih dari 3 tahun hingga usia layak petik. Jenis tanaman tahan teduh (1) *empon-empon* (tanaman obat-obatan/*wanafarma* seperti kunyit, jahe, kunci, kencur, temulawak), (2) umbi-umbian (porang, gadung, *ganyong*, talas), belum dibudidayakan dengan melibatkan peran swasta. Terbukti peran dan kontribusi swasta diakui sangat rendah yakni 37.61%.

Tinggi rendahnya penilaian petani hutan pada peran dan kontribusi beberapa institusi, senada dengan penilaian mereka pada hubungan atar institusi. Terbukti (Tabel 4) hubungan antara Perum Perhutani dengan pemerintah kabupaten (Ngawi) dinilai tinggi (85%) oleh masyarakat desa hutan (petani hutan). Fenomena ini sebagai refleksi kegiatan bersama kedua institusi tersebut, seperti pada proses sosialisasi (pertemuan, lokakarya) dan pelaksanaan program PHBM di lapangan berupa pendampingan oleh petugas Perum Perhutani dan penyuluh lapangan (PPL) Dinas Kehutanan Kabupaten. Kehadiran PPL dan petugas Perum Perhutani dinilai lebih tinggi (80% dan 77.38%) dari pada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan swasta yakni 61.9% dan 40%. Resi (2005) menemukan hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan LSM mencapai hasil yang relatif

memuaskan dalam memberdayakan masyarakat, berkat ada kerja sama yang saling mendukung terhadap program dan sasaran yang ingin dicapai.

Fakta tersebut mencerminkan petani hutan merasa: (a) dibantu petugas Perum Perhutani dalam pekerjaan teknik kehutanan, (b) dibantu PPL dalam pekerjaan tumpangsari (penanaman tanaman pangan/semusim), (c) belum dibantu LSM dalam manajemen atau organisasi sosial, dan (d) belum mendapat uluran tangan pihak swasta dalam membudidayakan tanaman tahan tebus meliputi permodalan awal, pemupukan, dan pemasarannya. Terkait dengan LSM, berbeda dengan temuan Resi (2005) pada masyarakat pesisir di Banyuwangi di mana hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan LSM mencapai hasil yang relatif memuaskan dalam memberdayakan masyarakat, berkat ada kerja sama yang saling mendukung terhadap program dan sasaran yang ingin dicapai.

Tingginya tingkat adaptivitas program PHBM bagi masyarakat desa hutan dapat ditunjukkan oleh penerimaan mereka atas beberapa aktivitas dalam penerapan program PHBM tersebut. Kegiatan program PHBM yang tingkat penerimaan tinggi adalah pembentukan organisasi lembaga masyarakat desa hutan/LMDH dan penerapan Perjanjian Kerjasama yakni sebesar 80% dan 75% (Tabel 5). LMDH dinilai sebagai *password* bagi petani hutan untuk mendapatkan lahan garapan di tanah Perum Perhutani, sedangkan Perjanjian Kerjasama (PHBM dan Tumpangsari) mereka perlukan sebagai pembuka memperoleh hak-hak dalam melaksanakan program PHBM. Wilayah hutan produksi milik Perum Perhutani yang terbagi habis menjadi *wengkon* (lahan hak garap sesuai dengan wilayah administrasi desa), memang menjadi dambaan masyarakat desa hutan. Mereka berupaya keras untuk mendapatkan *wengkon* sebagai *wanareksa* (lahan garapannya), salah satu syaratnya adalah menjadi anggota LMDH dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani. Masyarakat desa hutan yang kian termarginalkan dan tergolong petani *subsistence* (pencari nafkah untuk penyambung hidup dan di kabupaten Ngawi terdapat 61% dari 879.193 jiwa penduduk, tergolong pra sejahtera), sangat memerlukan lahan garapan tersebut.

Nilai tertinggi sebagai wujud nilai dan fungsi hutan sosial (Tabel 6) yang dirasakan petani hutan melalui program PHBM adalah ajakan untuk dilibatkan dan berperan bersama pemerintah dalam program tersebut yakni 87.61% dan 70%. Kehadiran program PHBM menjadi pembuka peluang petani hutan untuk lebih leluasa dalam berinteraksi dengan lahan sumber mata pencahariannya. Petani hutan yang menganggap program PHBM sebagai peleraai konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan (Perum Perhutani) di masa lalu (pendekatan *polisioner*) sebesar 57.62%. Kearifan petani hutan dalam menyikapi kondisi masa lalu tersebut dikuatkan oleh penilaian mereka pada program PHBM yang dianggap sebagai wahana /uluran moral dan spiritual (hutan dianggap sebagai anugerah yang perlu disyukuri) bagi petani hutan (70%) dari pada terapi psikologis (60%). Fakta tersebut sebagai cerminan sebagian besar sikap petani hutan lebih menjunjung nilai kerokhanian dari pada nilai rasional. Sebagian kecil petani hutan mensikapi lahan garapan milik pemerintah itu dinilai sebagai sumber pencarian nafkah semata untuk menghasilkan nilai ekonomi yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sikap demikian rentan terhadap perilaku yang mengabaikan terpeliharanya tanaman pokok kehutanan yang berarti mengancam kelestarian hutan.

Peningkatan pendapatan, dan terserapnya tenaga kerja, masing-masing dengan perolehan skor 85% (Tabel 7) diakui oleh petani hutan sebagai alasan bahwa program PHBM memiliki tingkat keberlanjutan secara ekonomi. Program PHBM dinilai belum memberi sumbangan pada produksi pangan (57.5%), pada hal data lain mencatat bahwa sumbangan pangan dari hasil tanaman pertanian/palawija masyarakat desa hutan se kabupaten Ngawi pada 2007 senilai Rp 37, 45 miliar dan sebesar Rp 30,8 miliar diperoleh dari tanaman kacang tanah.

Bagi hasil (*Sharing*) hasil hutan yang menjadi *icon* pembeda PHBM dengan praktek hutan sosial sebelumnya, diakui oleh petani hutan sebagai bukti/jaminan keberlanjutan secara ekonomi pengelolaan hutan sosial yakni sebesar 70%. *Sharing* hasil hutan (tanaman pokok kehutanan) diberikan dengan tahapan sejalan dengan saat penjarangan (Tabel 8). Pengakuan itu bersifat asumptif karena saat ini belum sepenuhnya dinikmati dan bahkan kelak bukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh anak cucu.

Jika dihitung, kelak perolehan nilai *sharing* petani hutan dengan luas garapan 0,25 hektar pada usia pohon 40 tahun (penjarangan keempat) adalah $25\% \times \frac{1}{2} \times 30 \times \text{Rp}.37 \text{ juta} = \text{Rp}. 138.750.000,00$ (nilai *sharing* 25%, jumlah pohon 30 batang, volume per batang $\frac{1}{2} \text{ m}^3$, harga kayu Rp 37 juta per m^3). Nilai *sharing* tahun 2007 program PHBM di kabupaten Ngawi sebesar Rp 213.857.952,00 (rata-rata Rp 2.545.928,00 per LMDH). LMDH penerima *sharing* tertinggi di kabupaten ini senilai Rp 18.681.565,00 (perolehan rata-rata LMDH di wilayah KPH Pernalang sekitar Rp 60,15 juta. (Duta Rimba Edisi 23/Maret 2008:38). Dalam hal ini Mukadasi (2008) menemukan fakta di Uganda bahwa equitable benefit sharing by the community forest users serves as an indicator of better access to forest products.

Petani hutan menilai tinggi (Tabel 9) yakni 90% pada pernyataan bahwa jaminan keberlanjutan secara ekologi pengelolaan hutan sosial melalui program PHBM adalah terpeliharanya setiap pohon tanaman pokok kehutanan hingga akhir usia daur. Implikasi idealnya adalah mereka mendambakan tercapainya kelestarian 45.862,9 ha hutan, terjaganya kelestarian lingkungan 1.298,8 km^2 wilayah, dan tersejahterakannya 879.193 jiwa penduduk kabupaten Ngawi. Syarat ideal agar terpelihara tanaman pokok kehutanan adalah bebas dari gangguan hama, gangguan ternak, bencana alam, pencurian, dan aktivitas manusia yang dapat mengganggu tegakan tanaman tersebut. Petani hutan yang mengaku bahwa tegakan tanaman pokok kehutanan terhindar dari pekerjaan tumpangsari dalam pelaksanaan program PHBM sebesar 65%. Artinya, kegiatan petani hutan dalam melaksanakan tumpangsari (menanam tanaman pertanian selahan dengan tanaman pokok kehutanan) dapat mengganggu tegakan tanaman pokok kehutanan. Terutama petani hutan yang aktivitasnya berorientasi jangka pendek (hanya mementingkan tanaman pertanian) cenderung mengabaikan kelestarian hutan. Aktivitas yang telah berlangsung adalah: (a) mengganggu tumbuhnya bibit yang baru ditanam seperti: tercabut, terinjak, terbakar bersamaan dengan pembakaran sisa tanaman pertanian, dan terkena peralatan/batang saat memanen atau terbakar sisa tebang tebu (bagi tumpangsari tebu); (b) memangkas daun atau dahan tumbuhan tanaman kehutanan agar tidak meneduhi tanaman pertanian; dan (c) memotong tanaman pokok kehutanan yang relatif masih muda untuk kepentingan lain.

Keberlanjutan secara sosial budaya ditandai oleh masih terpeliharanya atau masih terdapatnya kelanggengan nilai, pranata, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat desa hutan terkait pelaksanaan program PHBM di wilayah mereka. Program PHBM diakui sebagai media atau sarana terpeliharanya semangat petani hutan yang berpedoman pada prinsip *jer basuk mawa bea* artinya, untuk sejahtera memerlukan

pengorbanan baik uang, tenaga, waktu dan pikiran. Pengakuan mereka senilai 95% (Tabel 10). Sukses yang diraih dengan penuh perjuangan adalah: (1) memetik hasil tanaman tumpangsari pada musim kemarau dan rentan hama; (2) mendapatkan *sharing* tanaman pokok kehutanan pada masa datang yang rentan gangguan (bencana dan *illegal logging*). Para petani hutan menilai bahwa program PHBM dapat menjadikan berkurangnya perilaku berinteraksi negatif terhadap hutan (pencurian kayu) sebesar 67.5%. Sebagian dari mereka meragukan kemampuan diri dalam ikut serta menjaga keamanan tanaman pokok kehutanan dari pencurian. Belum diperoleh metode yang tepat untuk mengantisipasi penjarahan ala masa lalu (pencurian masal atau terorganisir) di daerahnya, kecuali keyakinan bahwa melalui program PHBM, sesama warga tidak mungkin saling mengganggu, bahkan sebaliknya justru saling menjaga. Keyakinan ini akan ditunjang oleh gerakan moral para pemerhati kehutanan dengan slogan *From illegal logging to community logging* (Azis, 2007).

Kesimpulan dan Saran

Partisipasi masyarakat desa hutan pada program pemberdayaan di wilayahnya rendah. Meski hasil pemberdayaan di atas rata-rata, namun kurang mendukung kemandirian para petani hutan. Wujud keberdayaan masyarakat desa hutan adalah: (a) kemandirian dalam bermobilisasi cukup tinggi, (b) kemampuan ekonomi sedang, dan (c) keterlibatan politik rendah. Meski signifikansi pengaruh pengelolaan hutan sosial terhadap wujud keberdayaan masyarakat desa hutan tersebut cukup rendah, terdapat sinergisitas, adaptivitas, dan keberlanjutan pengelolaan program hutan sosial (program PHBM) yang berpengaruh pada pemberdayaan petani hutan, yakni sbb.: (1) terdapat dominasi peran, kontribusi, dan relasi antarinstansi pemerintah (pusat dan daerah) dalam pelaksanaan program PHBM. Dominasi tersebut mengurangi sinergisitas multiinstansi dalam mewujudkan *social responsibility* yang pada gilirannya dapat mengurangi dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat; (2) terdapat adaptivitas tinggi dalam hal: (a) pengupayaan status formal kesertaan pada program PHBM, (b) pengakuan/penghargaan atas nilai dan fungsi hutan sosial bagi petani hutan. Kedua hal itu menjadikan petani hutan kian berpartisipasi dan mengikuti program dengan daya upayanya sendiri (terberdaya); (3) terdapat nilai ekonomi, ekologi, dan sosial budaya sebagai wujud keberlanjutan pengelolaan hutan sosial (program PHBM) yang dapat mendukung *wealth empowerment* jangka panjang yang ditunjang oleh kecintaan terhadap lingkungan serta menjunjung tinggi nilai budaya.

Akhirnya perlu sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui program PHBM yang pelaksanaannya dimandatkan kepada Perum Perhutani.

Daftar Pustaka

- Azis, Marwan. 2007. *Pengembangan Community Logging*. <http://us.oneworld.net>.
- Hardjosoewito, Sukarno 2009. *Tata Kelola Hutan Sosial secara Sinergis-Adaptif-Berkelanjutan: Studi pada Program PHBM dan Hutan Rakyat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur*. Disertasi. Surabaya:PPS-Universitas 17 Agsutus 1945
- Mukadasi, Buyinza. 2008. *Participatory Indicators of Success of Community Forestry Programs in Uganda*. Jurnal Ilmu Kehutanan Vol II No 2-Juli 2008 hal 70-81 Yogyakarta: Fakultas Kehutanan-Universitas Gadjah Mada.
- Purwatiningsih, Annisa , Ismani HP, Irwan Noor. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian Dalam Kebijakan Program Dana Pembangunan Desa Wringin Anom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. IV, No.2, Maret - Agustus 2004. Malang: Program Pascasarjana-Universitas Brawijaya
- Resi, Andrianus, Ismail HP, Soesilo Zauhar. 2005. *Interaksi Birokrasi Pemerintah Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi tentang Sinergi Birokrasi Pemerintah dengan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur)*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. V, No. 1, September 2004-Februari 2005. Malang: Program Pascasarjana-Universitas Brawijaya
- Riyanto, Budi. 2004. *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan Di Indonesia*. Penyunting Suwarto. Bogor: LPHKL
- Siswoko, Bowo Budi. 2009. *Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari*. Jurnal Ilmu Kehutanan Vol III No Januari 2009 hal 1-12 Yogyakarta: Fakultas Kehutanan-Universitas Gadjah Mada.
- Soekamto, Hadi, Riyadi Soeprapto, Irwan Noor. 2004. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang)*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. IV, No.2, Maret - Agustus 2004. Malang: Program Pascasarjana-Universitas Brawijaya
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suprayitno, Adi Riyanto. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan*. <http://asury.blogspot.com/2009/02>. Minggu, Februari 15, 2009